

# **FUNGSI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN TAHAPAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2024**

ABDULLAH  
ELIDAR SARI  
YUSRIZAL

## **Abstrak**

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Bireuen merupakan pengawas Pemilu tingkat kabupaten yang hierarkis dengan Bawaslu Republik Indonesia, pada tahapan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 sebagaimana ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan pengawasan dan menyampaikan temuan jika ditemukan adanya kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif* untuk menganalisis fungsi pencegahan dan tantangan yang dihadapi Panwaslih Kabupaten Bireuen pada tahapan pendaftaran khususnya verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Bireuen, pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, analisis hasil verifikasi partai politik calon peserta Pemilu dan wawancara dengan anggota Panwaslih Provinsi Aceh dan Kabupaten Bireuen serta wawancara dengan anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen periode tahun 2018-2023.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panwaslih Kabupaten Bireuen telah menjalankan fungsi pencegahan pelanggaran dengan melakukan tugas, kewajiban dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan Pemilu dan melakukan sejumlah kegiatan pencegahan diantaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan Pemilu, sosialisasi pengawasan partisipatif, kerjasama dengan perguruan tinggi, mengawasi proses verifikasi partai politik dan menyampaikan himbauan/ saran perbaikan kepada KIP Kabupaten Bireuen serta pihak terkait lainnya. Tantangan yang dihadapi yaitu terbatasnya akses salinan dokumen anggota partai politik dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dan tidak ada data nama dan alamat *sampel* keanggotaan partai pada verifikasi faktual.

Bahwa salinan dokumen fisik persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu tidak tersedia di KIP Kabupaten Bireuen dan verifikasi administrasi dilakukan melalui SIPOL, sedangkan akses pada akun SIPOL view Bawaslu terbatas sehingga pencermatan dokumen dan pencegahan pelanggaran tidak dapat dilakukam secara cepat dan tepat. Diharapkan kedepan adanya sinkronisasi norma hukum antara Peraturan KPU dengan Peraturan Bawaslu terhadap hak akses dokumen tersebut agar tugas pengawasan dan pencegahan pelanggaran dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan.

**Kata Kunci:** Panwaslih, Pencegahan, Pendaftaran, Verifikasi Partai Politik.

**THE FUNCTIONS OF BIREUEN DISTRICT ELECTION SUPERVISORY  
COMMITTEE IN PREVENTING VIOLATIONS IN REGISTRATION  
STAGE OF POLITICAL PARTY PROSPECTIVE  
PARTICIPANTS IN THE 2024 ELECTION**

ABDULLAH  
ELIDAR SARI  
YUSRIZAL

***Abstract***

*The Bireuen Regency Election Supervisory Committee (Panwaslih) is an election supervisory at district level hierarchical with Bawaslu of Indonesian Republic, at the stage of registration of political parties as candidates for the 2024 Election as stipulated in Article 180 paragraph (1) and (2) of Law Number 7 of 2017 stated that Bawaslu, Provincial Bawaslu and Regency/City Bawaslu perform supervision and submit findings if there is any intention or negligence committed by the General Election Commission (KPU), Provincial KPU and Regency/ City KPU.*

*This research uses a normative juridical approach to analyze the prevention function and challenges faced by Panwaslih of Bireuen Regency at the registration stage, especially in verification of political parties as candidates for the 2024 Election in Bireuen Regency. and interviews with members of the Panwaslih of Aceh Province and Bireuen Regency as well as interviews with members of the Independent Election Commission (KIP) of Bireuen Regency for the 2018-2023 period.*

*The results of the research show that the Bireuen Regency Panwaslih has carried out the function of preventing violations by carrying out its duties, obligations and authority in accordance with election laws and regulations and carrying out a number of preventive activities including socializing election laws and regulations, socializing participatory supervision, collaborating with universities, supervising the process of verify political parties and giving appeals/ improvement suggestions to KIP Bireuen Regency and other related parties. The challenges faced were limited access to the copies of political party members' documents in the Political Party Information System (SIPOL) and the absence of sample data on political party members.*

*The copies of physical documents required for registration of political parties as candidates for election were not available at KIP of Bireuen Regency and administrative verification was carried out through SIPOL, meanwhile access to Bawaslu's SIPOL view account was limited that checking documents and preventing violations cannot be carried out quickly and precisely. It is hoped that in the future there will be synchronization of legal norms between KPU Regulations and Bawaslu Regulations regarding the right to access documents so that the task of monitoring and preventing violations can be done as stipulated.*

***Keywords:*** Panwaslih, Prevention, Registration, Verification of Political Parties.